

DIPLOMASI PUBLIK TIONGKOK TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA
DALAM PROYEK JALUR SUTRA

Dina, Putra Nurhud

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Al-Ghifari

Email: dina.shusein@gmail.com, putramakatita723@gmail.com

ABSTRAK

Artikel “Diplomasi Publik Tiongkok terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Proyek Jalur Sutra” merupakan penelitian yang berfokus kepada pengaruh yang ada pada kegiatan diplomasi publik oleh Tiongkok dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Penelitian ini mencoba untuk menguraikan konsep diplomasi khususnya diplomasi publik dengan instrumen-instrumennya yakni; media, konten dan teknik. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, serta sumber data dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kaitan yang terjadi serta pengaruh yang diakibatkan oleh proses diplomasi publik Tiongkok dalam *Belt and Road Forum* (BRF) dengan mencitrakan bangsanya sebagai negara terkaya kedua di dunia, dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia tentang Investor Tiongkok terkait Jalur Sutra.

Kata kunci: Diplomasi Publik, Kebijakan Luar negeri, Jalur Sutra, Tiongkok, Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Interaksi umat manusia merupakan hal yang paling menarik untuk terus disimak perkembangannya. Perkembangan ini merupakan bentuk-bentuk paling mutakhir yang manusia coba untuk mencapai kemasylahatan hidupnya. Manusia senantiasa membuka cakrawala interaksinya antar sesama di seluruh dunia mana saja yang mampu ia jangkau. Seperti halnya interaksi yang mungkin terjadi antara manusia suatu negara dan negara lainnya. Dimana hal ini lebih dikenal dengan proses diplomasi.

Proses diplomasi yang terjadi antar negara-negara dengan cara paling damai hari ini, bukan lagi merupakan hal yang dapat membuat kaget masyarakat dunia seperti apa yang mungkin dapat terjadi kepada masyarakat pra-*Westphalia*. Karena sudah dianggap wajar dan bukan lagi tabu bila kepercayaan dapat dibangun antar negara yang memiliki batas tegas kedaulatannya masing-masing. Konsep-konsep pun lahir dari rasa percaya satu sama lain seperti ini, seperti konsep saling ketergantungan, konsep perdagangan, hingga konsep tentang praktek-praktek diplomasi yang terjadi.

Hal seperti itu menjadi intensi tersendiri dalam makalah ini, dimana fokus yang akan diambil adalah salah satu dari cabang diplomasi jalur multi yakni; diplomasi publik. Diplomasi ini merupakan hal yang cukup menarik untuk dapat dikaji lebih dalam dengan mengambil contoh aktual yang terjadi di dunia dewasa ini. Apa lagi kalau bukan dari negara terkaya kedua dunia; Tiongkok. Tiongkok kala ini sedang gencar-gencarnya membangun dan menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan

negara-negara yang akan di lewati oleh jalur kuno leluhur negara tersebut, jalur sutra. Proyek yang kabarnya memakan dana sebesar \$3 triliun (<https://tirto.id/ambisi-cina-dengan-proyek-jalur-sutra-abad-21-cv27> diakses pada 17 Maret 2020), dan menjadi proyek serta kebijakan luar negeri Tiongkok yang paling ambisius bagi jalannya perekonomian dan perpolitikan dunia.

Formasi-formasi aliansi dunia kembali bermunculan. Salah satu di antaranya adalah Indonesia. Negara ini melalui apa yang disampaikan menteri kemaritiman Indroyono Soesilo, mantap untuk mendukung jalur garapan Tiongkok tersebut. Kabarnya Tiongkok memang menampilkan diri sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang begitu adidaya (<https://kabar24.bisnis.com/read/20141110/19/271822/diplomasi-jalur-sutra-ri-buka-pintu-bagi-investor-china> diakses pada 17 Maret 2020). Karena ini, Indonesia menyatakan dirinya sebagai pintu investasi bagi Tiongkok.

Untuk lebih memfokuskan diri dalam mencari kaitan sekaligus demi kepentingan analisis yang hendak dilakukan pada kesempatan ini, penulis melihat adanya fenomena Hubungan Internasional yang perlu untuk diuraikan di aspek diplomasi. Lebih khusus lagi diplomasi publik. Oleh karenanya, artikel ini akan berfokus kepada pencarian tentang pengaruh-pengaruh dalam sebuah praktek diplomasi yang dilancarkan Tiongkok kepada negara-negara di jalur sutra (sebagai publik internasional) sehingga membuat Indonesia berminat untuk memperkuat kebijakan tersebut.

Dari apa yang telah dipaparkan pada latar belakang artikel ini, maka penulis mengambil judul tulisan sebagai berikut; “Diplomasi Publik Tiongkok terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Proyek Jalur Sutra.”

b. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana gambaran umum Diplomasi Publik Tiongkok dalam jalur Sutra?
- b. Bagaimana penggunaan Instrumen Diplomasi Publik Tiongkok terhadap proses diplomasi publiknya ke Indonesia?
- c. Bagaimana akibat yang ditimbulkan konten Diplomasi Publik Tiongkok dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Diplomasi

Diplomasi dapat diartikan sebagai manajemen relasi diantara negara-negara melalui negosiasi. Negosiasi yang dimaksudkan di sini biasanya berupa negosiasi terhadap pembuatan suatu perjanjian atau persetujuan eksekutif, atau tawar-menawar dengan negara lain dalam persetujuan yang ingin dicapai sesuai kepentingannya masing-masing. Diplomasi itu sendiri merupakan alat bagi suatu negara untuk melaksanakan politik luar negeri. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, negosiasi, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait (Djelantik, 2008). Melalui media massa modern, masyarakat dapat berkomunikasi tanpa halangan birokratis.

Media massa modern telah menegaskan ide “diplomasi tanpa diplomat”. Perkembangan lain adalah peranan media massa dalam mengatur setting dan mekanisme diplomasi. Media ser

ing kali dianggap baik sebagai penunjang maupun penghambat diplomasi. Peranan mereka melalui penyiaran, melalui satelit, sangat membantu dalam menyediakan dan sebagai negosiator (Surya, 2011). Pentingnya media dan opini publik dalam urusan-urusan internasional menjadi intensif bagi para pemimpin untuk

semakin memperlihatkan diri di depan konstituennya sebagai bagian dari upaya propaganda. Diplomasi pada tingkat tertinggi ini semakin dipolitisasi dimana parlemen menginginkan informasi mengenai kebijakan luar negeri secara rinci (Surya, 2011).

Diplomasi dapat juga berarti cara dan bentuk yang dilakukan dalam pendekatan dan berunding dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan antar negara (Rudy, 2002). Revolusi komunikasi telah menggantikan posisi perwakilan negara dan diplomasi dan media komunikasi memberikan dampak terhadap opini dunia dan efek yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh ambassador atau diplomat.

Diplomasi saat ini dijalankan melalui media seperti televisi atau hal-hal yang dekat dengan publik serta sering didengar dan dibaca oleh publik. Sebagai tambahan, image negara dan image dari pemimpinnya menjadi hal yang sangat penting, karena di zaman demokratisasi setiap kebijakan luar negeri akan diperbincangkan oleh masyarakat internasional (Surya, 2011).

b. Diplomasi Publik

Perkembangan diplomasi dibagi menjadi dua, yakni diplomasi tradisional dan diplomasi modern. Dalam era global yang telah modern seperti sekarang ini, penggunaan diplomasi lebih banyak menggunakan diplomasi modern daripada diplomasi tradisional. Dikarenakan semakin hari perkembangan dunia semakin kompleks, dan saat ini aktor-aktor yang terlibat tidak hanya negara saja namun sudah banyak melibatkan aktor non negara seperti individu, kelompok, organisasi baik nasional maupun internasional. Ditambah saat ini negara tidak hanya bersaing

kredibilitas dengan negara lain saja, namun juga dengan media massa, corporation, NGO, I-GO dan berbagai kelompok kepentingan yang ada (Nye, 2011).

Isu utama diplomasi publik adalah arus transnasional dan ide-ide, kepentingan nasional dipromosikan dengan berbagai upaya untuk menyebarkan saling pengertian, informasi, dan mempengaruhi masyarakat asing (Djelantik, 2008). Mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor yang sangat penting yang berpengaruh terhadap perkembangan diplomasi adalah revolusi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Kecepatan dan kemudahan transportasi dan komunikasi telah mengurangi peranan diplomat. Perkembangan media elektronik dan teknologi informasi telah mengurangi pentingnya diplomat dalam mengumpulkan informasi, dan dalam kecepatan mengambil keputusan bereaksi secara segera terhadap peristiwa internasional melalui saluran diplomasi tradisional (Jackson, 2009).

Diplomasi Publik adalah komunikasi antar masyarakat agar mereka mengetahui, memahami, dan kemudian menyetujui pesan yang disampaikan oleh negaranya (Shoelhi, 2011). Diplomasi publik memungkinkan masyarakat, baik secara individu maupun dalam kelompok yang dibentuk oleh pemerintah, untuk berperan dalam memberi masukan bagi kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri. Diplomasi publik bertujuan menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui interaksi dengan kelompok-kelompok kepentingan (Djelantik, 2008).

Diplomasi memegang peran penting dalam merajut persaudaraan dan kerja sama antar bangsa. Diplomasi publik merupakan sebuah kebutuhan dalam mengembangkan politik diplomasi yang lebih menyentuh aspek sosial budaya guna melahirkan sikap

saling percaya dan saling mengerti sebagai landasan untuk bekerja sama satu sama lain (Shoelhi, 2011).

Mark Leonard menilai bahwa terdapat empat tujuan yang dapat dicapai dengan adanya diplomasi publik. Pertama, meningkatkan rasa kekeluargaan dengan negara lain, dengan cara membuat mereka memikirkan negara lain, memiliki citra yang baik terhadap suatu negara. Kedua, meningkatkan penghargaan masyarakat kepada negara tertentu, seperti mempunyai persepsi yang positif. Ketiga, mengeratkan hubungan dengan masyarakat di suatu negara, contohnya dengan cara pendidikan ke dalam kerja sama ilmiah, meyakinkan masyarakat di suatu negara untuk mendatangi tempat-tempat wisata, menjadi konsumen produk buatan lokal, pemberi pengetahuan mengenai nilai-nilai yang dijunjung oleh aktor. Keempat, mempengaruhi masyarakat di negara lain untuk berinvestasi, dan menjadi partner dalam hubungan politik (Leonard, 2002).

Dalam diplomasi publik biasanya dilakukan upaya dengan membentuk jaringan komunikasi sebagai wadah promosi hingga ke luar negeri, karena pada umumnya komunikasi internasional memanfaatkan komunikasi massa yang tersebar melintasi batas negara dan memiliki struktur jaringan komunikasi tertentu (Shoelhi, 2011). Dalam prakteknya diplomasi publik tidak selalu berjalan mulus, Nye menyebutnya sebagai `paradox of plenty` yang dapat diuraikan dalam empat hal, pertama, perlu untuk mengetahui persepsi dan sikap publik global terhadap suatu negara tertentu mengingat pasca Perang Dingin banyak terjadi realiansi politik dan ekonomi.

Kedua, transparansi media komunikasi membuat kelompok sasaran tidak terbatas pada satu negara saja, tapi berada pada tataran global. Ketiga, menurunnya kredibilitas pesan yang ada dalam proses diplomasi publik. Masyarakat cenderung

mempersiapkan apa yang dikomunikasikan oleh pemerintah sebagai bentuk propaganda. Keempat, Muncul banyak saluran komunikasi yang membutuhkan peninjauan ulang terhadap model komunikasi apa yang mesti digunakan (Nye, 2011).

Diplomasi publik memiliki ciri sebagai kelompok bukan pemerintah, bentuknya yang informal efektif dalam menurunkan tensi ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan meningkatkan saling ketergantungan di antara para pihak. Meski diplomasi tradisional telah gagal, diplomasi publik tidak lantas menggantikan diplomasi jalur pertama itu, tetapi melengkapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi tradisional. Idealnya, diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan antar pemerintah, memberi masukan melalui informasi-informasi penting, dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Untuk itu, diperlukan kerjasama aktor negara dan non-negara yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah. Aktor non-negara ini misalnya dapat berinteraksi dengan rekanan mereka dalam mempengaruhi, memberikan masukan, dan menerapkan kebijakan luar negeri yang biasa disebut diplomasi multijalur atau *Multi-track Diplomacy*.

Multi-track Diplomacy pada dasarnya adalah sebuah kerangka kerja konseptual dalam memandang proses perwujudan perdamaian internasional sebagai sebuah sistem kehidupan yang ideal. Semuanya tercakup dalam sebuah model jaring-jaring yang saling terkait antara individual, institusi dan komunitas yang bekerja bersama untuk satu tujuan tunggal yaitu perdamaian dunia. Konsep mengenai *Multi-Track Diplomacy* sebenarnya adalah sebuah ekspansi dari paradigma *Track One (Government)* dan *Track Two (Non Government)* yang telah membentuk kajian bidang ini dalam

beberapa dekade terakhir. Dalam perkembangan sejarahnya, konsep mengenai kedua jalur ini berawal dari sebuah kesadaran bahwa tidak selamanya sebuah interaksi formal, ofisial dan antar-pemerintah diantara perwakilan yang ditugaskan oleh Negara berdaulat masing-masing merupakan metode yang efektif dalam mencapai kerjasama internasional yang mutualistik ataupun menyelesaikan sebuah konflik atau perbedaan. Bahkan Warga Negara biasa dari berbagai macam latar belakang dan keahlian bisa menghadirkan sesuatu yang kredibel dan dapat membuat suatu perubahan (Djelantik, 2008).

Menurut Nye, terdapat tiga dimensi dari diplomasi publik. Yang pertama yakni komunikasi harian yang melibatkan penjelasan mengenai konteks keputusan kebijakan domestik maupun luar negeri. Dalam era internet dengan mebanjirnya informasi, dimensi ini penting dalam menekankan dan menjelaskan posisi pemerintah terutama dalam persiapan menghadapi krisis dimana komunikasi yang digencarkan pemerintah diharapkan menjadi yang utama dibanding dengan konten yang muncul yang berseberangan dengan nilai-nilai negara. Dimensi kedua adalah komunikasi strategis yang mengembangkan seperangkat tema sederhana, sebagaimana yang ada dalam kampanye politik atau iklan. Kampanye ini mencanangkan acara simbolis atau komunikasi tematis pada sepanjang tahun tertentu untuk menciptakan merek dari tema sentral atau untuk meningkatkan kebijakan tertentu dari pemerintah. Dimensi ketiga dari diplomasi publik menurut Nye adalah membangun hubungan jangka panjang yang kekal dengan tokoh-tokoh kunci selama bertahun-tahun atau bahkan dekade, baik melalui beasiswa, pertukaran, pelatihan, seminar, konferensi, maupun akses terhadap media (Nye, 2011).

Dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri tersebut. Pertama, faktor eksternal misalnya terdiri dari struktur sistem internasional, karakteristik ekonomi dunia, kebijakan dan tindakan aktor lain, permasalahan global dan regional yang diakibatkan oleh aktivitas swasta, serta hukum dan opini internasional. Kedua, faktor internal yang berasal dari dalam negeri misalnya kebutuhan sosio-ekonomi dan keamanan, karakteristik topografi dan geografis, atribut nasional negara, struktur dan filosofi pemerintah, opini publik, birokrasi, dan pertimbangan etis. Dalam mencapai tujuan-tujuan atau kepentingan nasional, berbagai sarana digunakan sebagai instrumen yang direfleksikan oleh kebijakan luar negeri. Diplomasi sendiri di sini adalah instrumen yang digunakan oleh aktor internasional, terutama negara, untuk menerapkan kebijakan luar negerinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut denzin dan Lincoln penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode kualitatif ini lebih menekankan aspek pencarian makna dibalik kenyataan empiris dari realitas sosial yang ada sehingga pemahaman yang mendalam akan realitas sosial tersebut dapat tercapai.

Menurut Iskandar penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan atau menguraikan fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan cara mendeskripsikan nilai variable mandiri, yang terdiri dari satu variable atau lebih berdasarkan indicator dari variable yang diteliti tanpa membuat perbandingan ataupun menghubungkan antara variable yang diteliti untuk eksplorasi dan klasifikasi dengan variable yang diteliti (Darman, 2014).

Pada akhirnya penelitian kualitatif deskriptif ini menjadi lebih mudah dipahami sebagai metode dimana datanya dapat berupa pernyataan-pernyataan dan data yang dihasilkan pun berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis maupun lisan. Metode ini digunakan untuk dapat membahas fenomena dan realita yang ada. Untuk dapat melihat dan menganalisis setiap tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan luar negerinya selama perang dingin. Juga untuk menjelaskan berbagai jenis data dan informasi untuk

mengetahui Implikasi perang dingin terhadap transformasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

b. Sumber Data

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Darman, 2014). Dengan demikian dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari sumber data sebagai berikut:

b.1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan utamanya dari berbagai literatur, baik buku, jurnal, media online, dan peraturan perundang-undangan. Kepustakaan sendiri berupa buku-buku yang dapat dijadikan acuan dalam menulis sebuah tulisan atau karya ilmiah, kajian pustaka sendiri alangkah baiknya harus sesuai dengan kajian yang akan ditulis dalam suatu penelitian. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. **Diplomasi Publik Tiongkok terhadap Indonesia**

Diplomasi yang digunakan Tiongkok adalah diplomasi dengan *Soft Power* atau lebih dikenal dengan diplomasi publik. Diplomasi publik di dalam kasus ini dapat kita katakan sebagai diplomasi publik *Multi-Track*, yakni diplomasi dengan menggunakan media massa Internasional yang ditujukan untuk publik Internasional (Nye, 2011). Berbeda dengan diplomasi *One-Track* yang hanya menggunakan satu lajur utama yakni *G to G* dimana pelaku utamanya hanya berjumlah dua aktor yang mewakili suatu negara. Hal seperti ini dikenal dengan bentuk diplomasi bilateral. Atau paradigma diplomasi yang lain yakni multilateral, dimana aktor yang berinteraksi dalam prosesnya harus berjumlah tiga atau lebih.

Perbedaan paling signifikan dari penjelasan yang ada pada Diplomasi Publik (dapat ditinjau kembali pada pemaparan di BAB 2) yakni penggunaan media massa dan efektifitasnya yang tidak diukur pada penggunaan bentuk-bentuk perjanjian. Sehingga, teknik-teknik yang diutamakan pada konsep diplomasi publik akan menekankan teknik seperti propaganda dan/atau *nation-branding*. Dalam penggunaan kedua teknik diplomasi publik tersebut tidak ada yang namanya janji tertulis (seperti halnya diplomasi bentuk lateral). Pada teknik-teknik tersebut diplomasi akan memfokuskan diri pada pencitraan aktor internasional dan bertujuan untuk menghasut serta mempengaruhi publik internasional. Publik internasional ini pun bisa beragam, yakni; Negara, Masyarakat dunia dan perusahaan multinasional.

Bila kita tarik kepada kasus dalam makalah ini, Tiongkok menggunakan forum *Belt and Road Forum* (BRF) sebagai medianya (<https://tirto.id/ambisi-cina-dengan-proyek-jalur-sutra-abad-21-cv27> diakses pada 18 Maret 2020). Ini menunjukkan indikasi pertama pada bentuk diplomasi yang Tiongkok gunakan, yakni Diplomasi Publik. Selanjutnya, konten yang perlu dicermati, dalam kaitannya dengan implikasi terhadap Indonesia, dimana Tiongkok menekankan diri bahwa jalur sutra merupakan proyek yang mampu memperkuat perekonomian seluruh dunia. Dan Tiongkok sebagai negara terkaya kedua dunia mampu mengembangkannya dan mem-*back up* seluruh kegiatan perekonomian pada jalur-jalur yang ada.

Konten tersebut merupakan titik awal untuk melihat bagaimana efektifnya diplomasi publik yang dilakukan Tiongkok. Demikian seluruh sikap yang terpengaruh melalui kontennya, salah satunya adalah sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia sebagai anggota yang menghadiri forum jalur sutra tersebut. Sikap Indonesia dalam hasil proses diplomasi publik tadi akan dibahas pada sub-bab selanjutnya. Sebelum itu mari kita uraikan bagaimana penggunaan instrumen oleh Tiongkok demi mencapai kepentingan Nasionalnya pada Proyek tersebut.

b. Penggunaan Instrumen Diplomasi Publik Tiongkok

Penggunaan Instrumen Diplomasi Publik Tiongkok yang awalnya telah disinggung pada sub-bab sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa Tiongkok menggunakan forum BRF untuk menyampaikan kontennya. Lalu teknik apa yang ia gunakan? Dan bagaimana teknik tersebut digunakan? Pada sub-bab ini akan dikupas

lebih lanjut tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebelumnya mari kita lihat salah satu penyampaian yang ada di dalam forum tersebut oleh presiden Tiongkok Xi Jin Ping;

"Kami akan berkontribusi merealisasikan prakarsa Jalur Sutra, sebuah proyek abad ini, yang akan memberikan keuntungan banyak orang di seluruh dunia.."

(news.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282982 diakses pada 18 maret 2020).

Pada pidato tersebut Tiongkok menjanjikan sebuah profit yang kasar terhadap dunia di bidang perekonomian. Mengapa Tiongkok bisa begitu optimis dengan gagasan tersebut? Hal ini dapat kita cermati melalui citra diri Tiongkok sendiri yang dikenal baik oleh publik internasional, bahwasanya Tiongkok merupakan negara terkaya kedua di dunia. Belum lagi *budget* yang relatif besar dalam *back up* proyek tersebut yakni sebesar \$3 Triliyun (<https://katadata.co.id/berita/2019/04/29/belt-and-road-initiative-menghidupkan-kembali-kejayaan-jalur-sutra> diakses pada 18 Maret 2020).

Citra seperti ini memunculkan rasa percaya dari masing-masing aktor yang coba dijadikan target dari diplomasi publik Tiongkok. Hal ini menjadi indikasi utama pada aspek teknik yang Tiongkok gunakan dalam instrumen diplomasinya yakni "Citra Bangsa" atau konsep tentang "*Nation-branding*". Dimana aktor Internasional mencoba membangun suatu citra yang baik demi opini publik internasional untuk menumbuhkan rasa percaya dalam menjalin hubungan kerjasama internasionalnya. Pada kasus ini Tiongkok menampilkan diri sebagaimana negara dengan kekayaan negara yang kuat dengan harapan opini publik menjadi baik dan berkehendak untuk menjalin hubungan diplomatik yang lebih kuat dengan Tiongkok.

Inti dari citra yang Tiongkok kembangkan pada diplomasinya adalah bahwa bangsanya merupakan bangsa yang kuat dalam bidang ekonomi sehingga bangsanya mampu untuk mengembangkan proyek mega seperti Jalur Sutra tersebut. Lalu bagaimana Efeknya kepada Indonesia? Apakah sudah cukup efektif teknik yang Tiongkok gunakan? Apakah konten yang Tiongkok masukan dalam proses diplomasi publiknya sudah cukup kuat dalam mempengaruhi sikap suatu negara (sebagai publik internasional)? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas lebih lanjut pada serangkaian paparan di sub-bab selanjutnya.

c. Pengaruh konten Diplomasi Publik Tiongkok terhadap Kebijakan

Luar Negeri Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi kekayaan alam serta pasar yang kuat bagi berkembangnya suatu perekonomian bangsa. Sehingga tidak mengherankan bila Indonesia menjadi salah satu target dari berdirinya proyek mega Jalur Sutra Tiongkok. Di Indonesia proyek ini menjadi bagian darinya sebagai jalur dagang laut atau “Jalur Maritim”. Dengan melihat kembali dari konten yang Tiongkok sampaikan melalui BRF dalam Diplomasi Publiknya. Indonesia merupakan salah satu negara yang sikap politik internasionalnya terpengaruhi oleh proses diplomasi publik Tiongkok. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa kebijakan luar negeri Indonesia terkait proyek tersebut.

Melalui koordinator menteri kemaritiman Indonesia Indroyono Soesilo, Indonesia akan tampil untuk memperkuat Jalur Sutra Tiongkok. Beliau pun menambahkan bahwa hal ini cukup rasional, meninjau kembali bahwa Tiongkok

memiliki *back up* dana yang kuat dalam perekonomiannya. Ia pun menyatakan bahwa ini merupakan kesempatan untuk menjadi mitra dan mengambil profit nyata sebagai negara dengan pintu investasi yang besar bagi US\$3 Triliyun tersebut (dibalik jalur Sutra) (<https://kabar24.bisnis.com/read/20141110/19/271822/diplomasi-jalur-sutra-ri-buka-pintu-bagi-investor-china> diakses pada 18 Maret 2020).

Seiring dengan pernyataan tersebut, ternyata Indonesia pun telah mengeluarkan beberapa tawaran menggiurkan melalui kebijakan luar Negerinya terhadap Tiongkok. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah kemudahan perizinan bagi penggunaan lahan bagi investor Tiongkok, tawaran proyek pembangkit listrik 35.000 watt, pembangunan 24 pelabuhan serta pembangunan jalur kereta api di Sumatra, Kalimantan dan Papua (<https://economy.okezone.com/read/2017/05/13/320/1690276/ktt-jalur-sutera-indonesia-tawarkan-proyek-plta-hingga-bandara> diakses pada 18 Maret 2020). Proyek-proyek tersebut merupakan hal yang diharapkan dari proses Diplomasi Publik Tiongkok terhadap target-targetnya di publik Internasional. Nampak bahwa Indonesia merupakan negara yang Tiongkok berhasil dalam membangun opini publik yang sesuai dengan citra bangsanya.

Dari paparan diatas dapat kita lihat bahwa efektifitas dari Instrumen Diplomasi Publik Tiongkok memiliki dampak yang baik bagi kepentingan Nasionalnya, terutama terhadap opini yang terbangun dalam sikap Indonesia. Konten yang Tiongkok sampaikan ternyata berjalan beriringan dengan *output* dari kebijakan luar negeri Indonesia menanggapi proyek Jalur Sutranya. Hal ini merupakan proses optimal dari menggunakan Diplomasi Publik yang tepat pada instrument-instrumennya. Instrument-instrumen tersebut dapat bekerja optimal sesuai konsep dari diplomasi publik dari

Tiongkok sehingga mampu membangun citra diri dan mendapat *output* yang diharapkan akan muncul dari publik Internasionalnya seperti Indonesia.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Diplomasi yang dilakukan oleh Tiongkok pada Proyek jalur Sutra merupakan jenis Diplomasi yang menggunakan *Soft Power* dan target dari Diplomasinya merupakan Publik Internasional. Sehingga Diplomasi tersebut dapat dikategorikan kepada Diplomasi Publik yang ditawarkan oleh Joseph S. Nye. Dalam melancarkan Diplomasinya, Tiongkok menggunakan Media Massa tertentu yakni *Belt and Road Forum* dimana di dalamnya terdapat target-target Publik yang Tiongkok intensikan. Kontennya pun merupakan sebuah rancangan Citra Bangsa atau "*Nation-Branding*". Dimana fakta bahwa Tiongkok merupakan negara terkaya kedua dunia serta *back up* dana dalam proyek jalur Sutra adalah Citra yang hendak disampaikan melalui diplomasinya.

Diplomasi Publik yang dilakukan Tiongkok dalam kasus Kebijakan Luar Negeri Indonesia dapat dikatakan berhasil. Dikarenakan, beberapa pemaparan alasan tentang proyek-proyek yang ditawarkan Indonesia kepada Tiongkok ternyata berjalan beriringan dengan konten yang Tiongkok sampaikan pada proses diplomasi Publiknya. Sehingga opini yang diharapkan timbul dari salah satu targetnya, yakni Indonesia. Dimana alasan tersebut dapat disimak melalui pemaparan Koordinator Menteri Kemaritiman Indonesia bahwa Indonesia akan menjadi "Pintu investasi" yang terbuka lebar bagi Tiongkok. Serta Indonesia melihat bahwa Jalur Sutra merupakan kesempatan bagus untuk menjadi mitra dengan Tiongkok pada proyek tersebut.

b. Saran

Meski pada Citra yang dikenal baik oleh publik Internasional bahwa Tiongkok merupakan negara terkaya kedua di dunia. Serta fakta bahwa US\$3 Triliyun siap digolongkan untuk *memback up* proyek jalur Sutra, kita sebagai bangsa Indonesia harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan kebijakan luar negeri yang rasional daripada birokratis (lihat pada buku G. Allison tentang teori pengambilan keputusan) bahwasanya setiap bentuk diplomasi tidak lepas dari perhitungan matang tentang kepentingan nasional suatu aktor, bukan tentang kepentingan dunia. Sehingga suatu kebijakan yang mendukung atau menolak bahkan menjaga jarak terhadap kegiatan internasional tertentu haruslah berdasar kepada pertimbangan matang tentang Sistem Internasional yang mungkin terjadi. Pertanyaannya harus selalu berkuat kepada positif, negatif atau zero sum Game. Bukannya hanya terhadap janji dari sebuah konten dalam berdiplomasi.

Selebihnya, artikel ini memiliki banyak sekali kekurangan dari beberapa aspek yang perlu diteliti untuk sekedar menyarankan solusi praktis dalam politik Internasional Indonesia, seperti; *Game Theory*, *Nation Interest* serta *Internasional System*. Karena pada intensinya, artikel ini hanya berfokus pada salah satu usaha komprehensif dalam menguraikan konsep tentang diplomasi khususnya diplomasi publik. Diharapkan dengan adanya artikel ini, penulis dan peneliti selanjutnya terstimulasi untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut kepada studi kasus Jalur Sutra tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

a. Daftar Buku

Darman, D. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Djelantik, S. (2008). *Diplomasi antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jackson, R. H. (2009). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Leonard, M. (2002). *Public Diplomacy*. London: Foreign Policy Centre.

Nye, J. S. (2011). *The Future of Power*. Public Affairs.

Rudy, T. M. (2002). *Komunikasi dan Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

Shoelhi, M. (2011). *Diplomasi Praktik Hubungan Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Surya, A. (2011). *Praktik Diplomasi Terpilih pada Masa Perang Dingin*. Bandung: Kibar Internasional.

a. Referensi Elektronik

<https://tirto.id/ambisi-cina-dengan-proyek-jalur-sutra-abad-21-cv27> diakses pada 17 Maret 2020

<https://economy.okezone.com/read/2017/05/13/320/1690276/ktt-jalur-sutera-indonesia-tawarkan-proyek-plta-hingga-bandara> diakses pada 18 Maret 2020

<https://kabar24.bisnis.com/read/20141110/19/271822/diplomasi-jalur-sutra-ri-buka-pintu-bagi-investor-china> diakses pada 18 Maret 2020

<https://katadata.co.id/berita/2019/04/29/belt-and-road-initiative-menghidupkan-kembali-kejayaan-jalur-sutra> diakses pada 18 Maret 2020